

INDONESIA DI TENGAH KESEPAKATAN ACFTA

Oleh: Lidya Christin Sinaga

Abstract

The ASEAN-China Free Trade Area (ACFTA) formally took effect as of Januari 1, 2010. The initial phase of the trade agreement was in force in early 2004, also known as the Early Harvest Programme (EHP). A free trade area covering trade in goods between China and the original six ASEAN members, including Indonesia, is to be completed by 2010 and the remaining four by 2015. However, the socialization of EHP scheme by Indonesian government relatively poor and made it difficult for business sector, especially Small and Medium Enterprises (SMEs) in Indonesia to exploit this scheme. The full implementation of ACFTA on January 2010 has given strong pushes from business sectors to delay the implementation. The basic problem is in our domestic capacity and capability which is not yet competitive enough to compete, especially with China products. Therefore, this paper will analyze the impact of ACFTA on Indonesia and what should be done to counter the impacts.

Pengantar

Hubungan ASEAN-China pada dasarnya terbuka secara bertahap dengan adanya normalisasi hubungan Indonesia-China pada tahun 1990, yang kemudian disusul dengan Singapura (3 Oktober 1990). Sebelum tahun 1990, belum ada hubungan resmi antara ASEAN sebagai kelompok dengan China, meskipun hubungan bilateral antara China dengan beberapa negara anggota ASEAN sudah ada, sebut saja Malaysia (1974), Thailand dan Filipina (1975).

Diawali dengan hadirnya Menteri Luar Negeri China pada sesi pembukaan *ASEAN Ministerial Meeting* (AMM) ke-24 di Kuala Lumpur, 19 Juli 1991, China menyampaikan ketertarikannya untuk bekerja sama dengan ASEAN. Hubungan ini semakin berkembang dengan ikut sertanya China dalam *ASEAN Regional Forum* (ARF) mulai tahun 1994. Hingga akhirnya, pada AMM ke-29 di Jakarta, Juli 1996, ASEAN menyetujui status mitra dialog penuh bagi China menggantikan statusnya semula sebagai mitra konsultatif yang telah disandang sejak tahun 1991. Pada Desember 1997, Presiden China saat itu, Jiang Zemin, dan seluruh pemimpin negara ASEAN mengadakan pertemuan informal pertamanya dalam kerangka ASEAN+1 dan mengeluarkan pernyataan bersama untuk membentuk kemitraan berdasarkan prinsip bertetangga yang baik (*good*

neighbourhood) dan saling percaya menuju abad ke-21.

Meskipun hubungan resmi ASEAN-China telah dimulai sejak tahun 1996, namun baru pada tahun 2001 hubungan ASEAN-China menunjukkan kemajuan yang berarti, yaitu ketika China mengusulkan pembentukan wilayah perdagangan bebas (*free trade area/FTA*) yang difokuskan pada bidang pertanian, teknologi informasi, pengembangan sumber daya manusia, investasi, dan kerja sama lembah sungai Mekong.

Isu perdagangan bebas antara ASEAN-China inilah yang kemudian menjadi berita hangat, khususnya di Indonesia, menjelang implementasi pada tahun 2010 ini. Indonesia sebagai salah satu negara anggota ASEAN sudah pasti menjadi bagian dari perjanjian tersebut. Isu perdagangan bebas dengan China ini menjadi bahasan menarik karena di dalamnya terdapat sudut pandang yang berseberangan dalam melihat keuntungan dan kerugian yang akan diperoleh Indonesia. Bagi sebagian kalangan, Indonesia dirasa terlalu cepat dan terlalu lebar membuka pasarnya. Sementara, bagi sebagian lagi, Indonesia dirasa tertinggal dari negara tetangganya yang sudah lebih dahulu melangkah ke perdagangan bebas bilateral. Tulisan ini akan melihat bagaimana hubungan ekonomi dan politik antara Indonesia-China selama ini, apalagi dengan dilaksanakannya ACFTA. Apa implikasi perjanjian ini bagi Indonesia dan apa

yang harus Indonesia lakukan, akan dianalisis lebih jauh dalam tulisan ini.

Hubungan Ekonomi-Politik Indonesia-China

Hubungan diplomatik Republik Indonesia (RI)-Republik Rakyat China (RRC) secara resmi sudah dibuka sedari 9 Juni 1950. Pada November 1953, kemudian ditandatangani perjanjian perdagangan RI-RRC yang pertama di Beijing. Selanjutnya, Perdana Menteri (PM) Zhou Enlai menghadiri Konferensi Asia Afrika (KAA) di Bandung pada 26-28 April 1955 dan menandatangani perjanjian dwi kenegaraan RI-RRC. Setelah itu, hubungan di antara kedua negara diwarnai dengan saling kunjung antarpihak pemerintah.

Peristiwa Gerakan 30 September/G-30-S, 30 September 1965, menjadi titik awal hubungan keduanya menjadi memburuk. Akibat peristiwa ini, pada 23 Oktober 1967 Kedutaan Besar (Kedubes) RI di Beijing ditutup dan seminggu setelahnya Kedubes RRC di Jakarta pun mengalami hal yang sama. Periode 1967–1990 diwarnai pembekuan hubungan diplomatik di antara keduanya. Pada masa ini, kepentingan Indonesia di China diwakili Kedubes Kamboja di Beijing, sedangkan China diwakili Kedubes Rumania di Jakarta.¹

Baru pada 24 Februari 1989, ketika Presiden Soeharto bertemu Menteri Luar Negeri (Menlu) RRC saat itu, Qian Qichen, dalam upacara pemakaman Kaisar Hirohito di Tokyo, dibahaslah tentang normalisasi hubungan keduanya yang tengah membeku. Pembahasan ini kemudian dilanjutkan dengan pertemuan di Tokyo antara Menlu RI, Ali Alatas, dan Qian Qichen pada 4 Oktober 1989. Akhirnya, pada 3 Juli 1990, kedua Menlu menandatangani Komunike Bersama “The Resumption of the Diplomatic Relations between the Two Countries” di Beijing dan diikuti dengan kunjungan PM Li Peng ke Indonesia sekaligus menyaksikan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) Pemulihan Hubungan Diplomatik kedua negara pada 8 Agustus 1990. Presiden Soeharto pun melakukan kunjungan

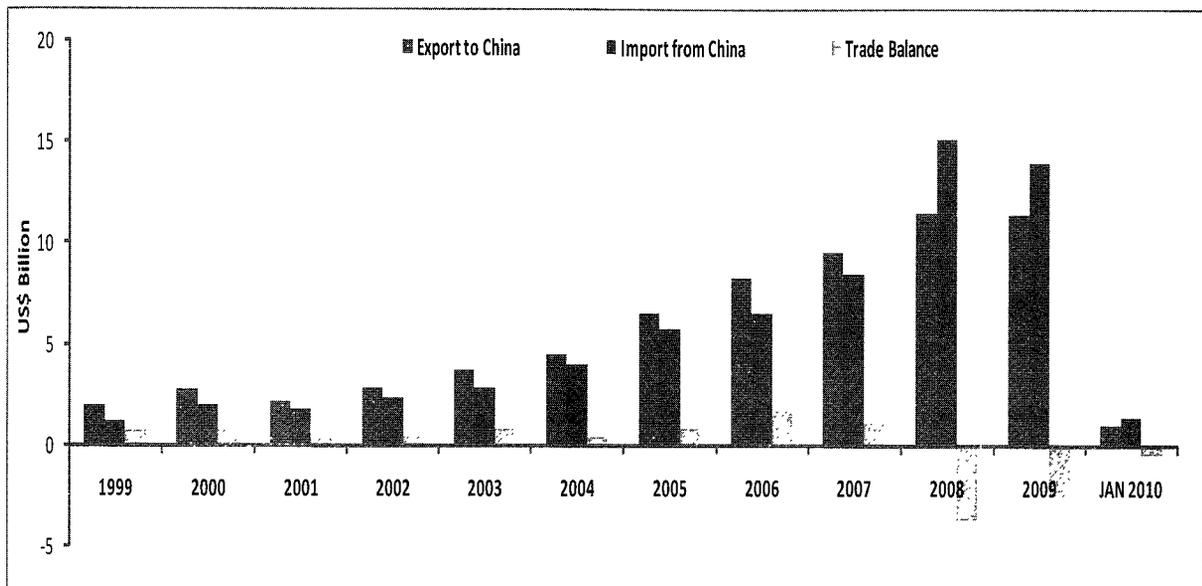
balasan pada 14–18 November 1990 sekaligus menandatangani pembentukan Komisi Bersama Bidang Ekonomi, Perdagangan, dan Kerja sama Teknik. Saling kunjung antarkedua negara cukup intens dilakukan setelahnya, hingga akhirnya China pun secara resmi menjadi mitra dialog ASEAN pada 1996.

Pada Mei 1998, pecahlah kerusuhan di Jakarta yang pada akhirnya menumbangkan rezim pemerintahan Soeharto. Etnis China menjadi korban terbesar dalam kerusuhan ini. Pemerintah China pun langsung menyerukan keprihatinannya dan berharap agar Indonesia lebih bersungguh-sungguh melindungi etnis China yang ada di wilayahnya. Pasca-Orde Baru, dengan iklim politik yang lebih terbuka, etnis China di Indonesia mulai mendapat perlakuan politik yang lebih baik. Bahkan, dalam pemerintahan Abdurrahman Wahid (1999–2001), China mendapat posisi yang istimewa dalam politik luar negeri Indonesia, ditunjukkan dengan menjadi negara pertama yang dikunjungi Wahid setelah ia dilantik menjadi Presiden. Kunjungan Wahid pada 1–3 Desember 1999 menjadi babak baru peningkatan hubungan bilateral antara keduanya yang ditandai dengan kesediaan Beijing untuk memberi bantuan keuangan serta fasilitas kredit, termasuk disepakatinya kerja sama keuangan, teknologi, perikanan, pariwisata serta *counter trade* di bidang energi, yaitu menukar LNG Indonesia dengan produk-produk China. Megawati Soekarnoputri yang memerintah pasca-presiden Wahid juga meneruskan hubungan baik dengan China ini. Dalam kunjungan kenegaraannya ke Beijing, 24–27 Maret 2002, disepakati untuk meningkatkan kerja sama ekonomi dan politik.²

Hubungan di antara RI-RRC mencapai puncaknya dengan ditandatanganinya Deklarasi Kemitraan Strategis (*Strategic Partnership*) pada 25 April 2005 di Jakarta saat Presiden RRC, Hu Jintao, berkunjung ke Indonesia dalam peringatan 50 tahun KAA di Bandung. Kemitraan strategis ini mencakup kerja sama di bidang politik dan keamanan, ekonomi dan pembangunan serta sosial budaya dan kerja sama lainnya. Setelah penandatanganan Deklarasi Bersama ini, hu-

¹ Gudadi Sasongko, “Kronologi Hubungan RI-RRC 1950–2008” dalam I. Wibowo dan Syamsul Hadi (Ed.), *Merangkul China Hubungan Indonesia-China Pasca-Soeharto*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2009), hlm. 294.

² Syamsul Hadi, “Hubungan Indonesia-China di Era Pasca-Orde Baru: Perspektif Indonesia” dalam I. Wibowo dan Syamsul Hadi (Ed.), *op.cit*, hlm. 56–57.



Grafik 1. Neraca Perdagangan Indonesia - RRC

Sumber: BPS 2010 (Diolah Litbang Kementerian Perdagangan)*

*Disampaikan oleh Gusmardi Bustami dalam Round Table Discussion “Indonesia di Tengah Pusaran Arus Perdagangan Bebas” diselenggarakan oleh Pusat Penelitian Politik LIPI, Jakarta, 27 April 2010.

hubungan kedua negara berkembang dengan pesat. Di bidang ekonomi, target volume perdagangan sebesar US \$ 30 miliar pada tahun 2010, sudah tercapai pada tahun 2008. Bahkan pada tahun 2010 ini, Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono (SBY) mencanangkan target baru, yaitu US \$ 50 miliar untuk jangka waktu 5 tahun ke depan (2010–2015). Capaian penting lainnya adalah pembentukan Mekanisme Dialog Tingkat Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam)-State Councillor pada Juli 2005; Forum Konsultasi Kerja sama Maritim pada Desember 2006; Persetujuan tentang Kerja sama Aktivitas dalam Bidang Pertahanan pada Desember 2007; dan Perjanjian Ekstradisi pada Juli 2009.

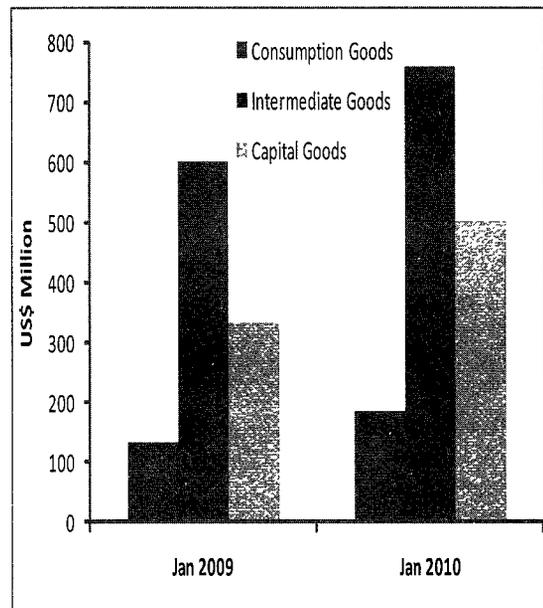
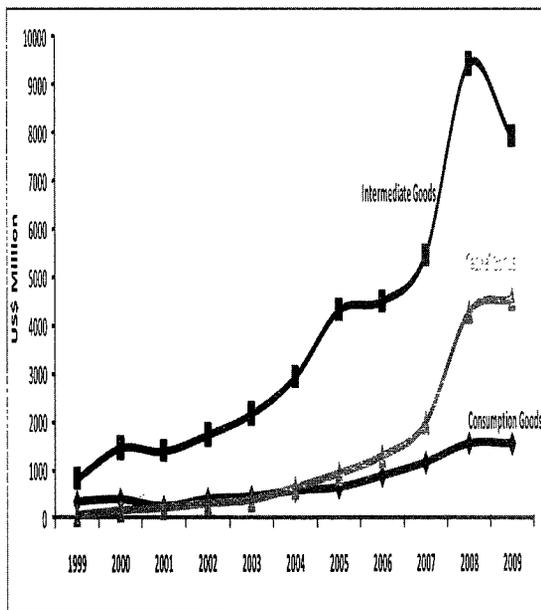
Di samping itu, pada Pertemuan Dialog ke-2 Tingkat Menko Polhukam (State Councillor), 21 Januari 2010, di Jakarta, telah ditandatangani *Plan of Action (PoA) Deklarasi Bersama Kemitraan Strategis RI-RRC* yang berisi berbagai program kegiatan konkret sebagai upaya implementasi butir-butir kesepakatan yang tertuang dalam Deklarasi Bersama tersebut untuk periode 5 tahun ke depan (2010–2015). Pada kesempatan terpisah juga telah ditandatangani dua dokumen lainnya, yaitu *MoU on Grant Assistance in*

Relation to Economic and Technical Cooperation dan Exchange of Letters on Holding of 2 (two) Workshops in China for Indonesian Officials Using the Grant of the Government of the People's Republic of China. Pada kesempatan pertemuan bilateral di sela *Asia Pacific Economic Cooperation (APEC) Economic Leaders Meeting* di Singapura, November 2009, Presiden SBY dan Presiden RRC, Hu Jintao, mencanangkan tahun 2010 sebagai tahun persahabatan RI-RRC.³

Pascakrisis ekonomi 1997, hubungan ekonomi kedua negara sebenarnya terus menunjukkan grafik yang menggembirakan. Hal ini bisa dilihat pada neraca perdagangan Indonesia-RRC (Grafik 1) yang terus menunjukkan peningkatan dari tahun 1999.

Antara periode 1999–2007, Indonesia mengalami surplus perdagangan dengan RRC. Namun, selama tahun 2008–2009, Indonesia mengalami defisit, meskipun defisit telah berkurang pada 2009 dan awal 2010. Defisit ini disinyalir karena banyaknya investasi dan proyek infrastruktur yang dibangun China di Indonesia

³ “Penandatanganan *Plan of Action* Deklarasi Bersama Kemitraan Strategis RI-RRC”, <http://www.deplu.go.id/beijing/Pages/Print.aspx?ListName=EmbassiesNews&IDP=12&CID=id-ID>, diakses pada 16 Agustus 2010.



Grafik 2. Impor Indonesia dari China menurut Golongan Penggunaan Barang

Sumber: BPS, 2010.*

*Ibid.

pada periode 2008–2009, seperti pembangunan Jembatan Suramadu (Surabaya–Madura), proyek jalan, proyek Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) 10.000 Megawatt, yang menyebabkan neraca perdagangan Indonesia atas RRC menjadi negatif. Di tahun 2010 terjadi kelanjutan, tetapi minusnya menjadi berkurang dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

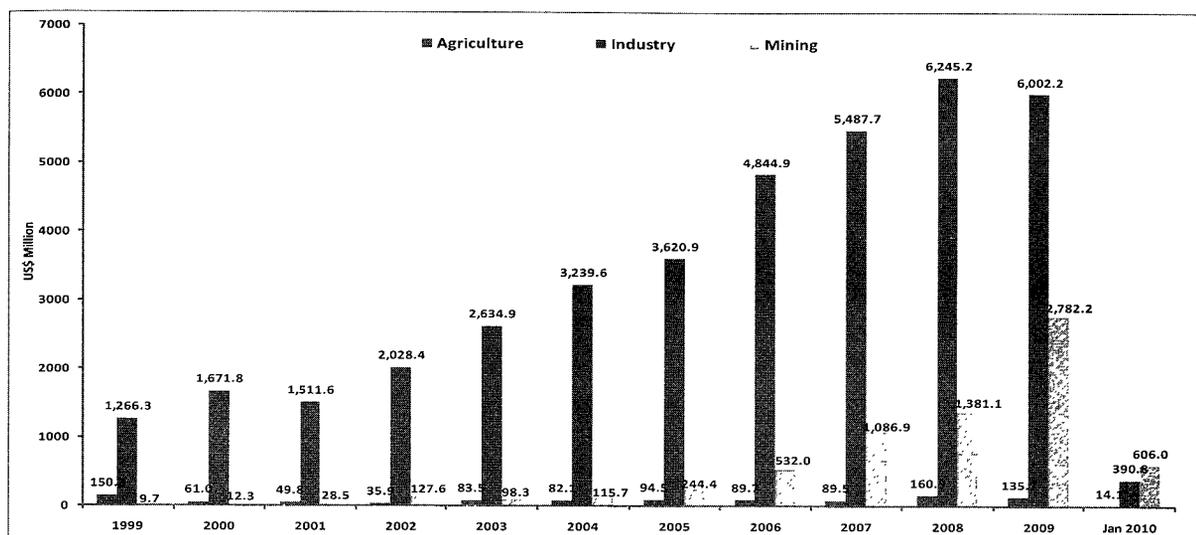
Saat ini China memang telah menjadi salah satu mitra dagang terbesar Indonesia. China merupakan negara tujuan ekspor terbesar ke-4 bagi Indonesia setelah Uni Eropa (UE), Jepang, dan Amerika Serikat (AS). Total ekspor nonmigas Indonesia ke China mengalami peningkatan antara tahun 2004 sebesar 6,1% menjadi sekitar 9,1% tahun 2009. Pada periode yang sama, pangsa ekspor ke Uni Eropa, Amerika Serikat, dan Jepang mulai berkurang. Demikian pula dari sektor impor, China merupakan sumber impor kedua Indonesia setelah ASEAN. Jika pada tahun 2004, impor Indonesia dari China hanya sebesar 7,9% maka pada 2009 melonjak ke 19,77%. Impor Indonesia dari Amerika Serikat menurun drastis, dari 19% pada 2004 menjadi 10,31% pada 2009. China nampaknya telah mengambil alih impor Indonesia dari AS tersebut.

Jika dilihat, impor Indonesia dari China sebenarnya yang paling banyak adalah bahan baku penolong (*intermediate goods*) dan barang modal (*capital goods*) dibanding dengan barang konsumsi (*customer goods*). *Customer goods* memang meningkat, tetapi peningkatannya tidak sebesar *intermediate goods* dan *capital goods*. Kedua kelompok barang tersebut digunakan oleh industri dalam negeri untuk pasar dalam negeri dan ekspor.

Sementara itu, ekspor Indonesia ke China paling banyak adalah produk industri, diikuti sektor pertambangan, dan sektor pertanian, meskipun pertumbuhan ekspor paling besar selama periode 1999–2009 adalah sektor pertambangan. Hal ini tentu terkait dengan kebutuhan China akan energi yang semakin besar seiring dengan *booming* perekonomiannya, terutama minyak dan adanya kerja sama energi antara China dan Indonesia dalam bentuk forum energi yang dibentuk sejak tahun 2002 sebagai payung investasi China di Indonesia dalam bidang energi.

Pembentukan ACFTA

Berawal dari pertemuan ASEAN+3 di Singapura tahun 2000 tercetuslah ide pembentukan kawasan perdagangan bebas ASEAN-China untuk



Grafik 3. Ekspor Indonesia ke China berdasarkan Sektor

Sumber: BPS, 2010.*

*Disampaikan oleh Thomas Darmawan Round Table Discussion “Indonesia di Tengah Pusaran Arus Perdagangan Bebas” diselenggarakan oleh Pusat Penelitian Politik LIPI, Jakarta, 27 April 2010.

pertama kalinya. Pada waktu itu, pemimpin negara-negara ASEAN merasa khawatir akan dampak masuknya China ke World Trade Organization (WTO). Mereka beranggapan bahwa China akan semakin kompetitif dalam menarik investasi asing dan ASEAN harus bersaing lebih ketat dengan China dalam merebut pasar ekspor. Oleh karena itu, kekhawatiran ini dilontarkan kepada Perdana Menteri Zhu Rongji dengan mengusulkan dilakukannya studi bersama mengenai dampak masuknya China ke WTO. Ternyata Zhu Rongji tidak hanya menyetujui usul tersebut, tetapi juga lebih jauh mengusulkan dilakukannya studi kelayakan tentang kemungkinan perdagangan bebas antara ASEAN dan China. Pertimbangannya adalah sesudah China menjadi anggota WTO maka pasar China akan semakin terbuka. Sementara itu, ASEAN sedang dalam proses menuju AFTA, tidaklah mustahil untuk melakukan pengaturan perdagangan kedua belah pihak. Di satu sisi, ASEAN bisa menarik keuntungan dari liberalisasi dan pertumbuhan tinggi di China, namun di sisi lain China bisa memperluas hubungannya dengan ASEAN melalui pemanfaatan mekanisme AFTA untuk memperluas pasar dan investasi di masa depan. Zhu Rongji kemudian meresmikan usulan ASEAN-China *Free Trade Area* (ACFTA) pada

pertemuan ASEAN+1 tahun 2001 di mana ASEAN menyambut positif tawaran tersebut. Nampaknya, tawaran FTA dari China ini semakin menegaskan arah dan langkah ASEAN dalam memperkuat integrasi di kawasan.⁴

Pengumuman di tahun 2001 tentang rencana ASEAN dan China akan membentuk kawasan perdagangan bebas dipandang sebagai suatu kemajuan luar biasa dalam hubungan ASEAN-China. Tahun 2002, pada ASEAN-China Summit ke-6 di Kamboja, para pemimpin ASEAN dan perdana menteri China saat itu, Zhu Rongji, menandatangani *Framework Agreement on The Comprehensive Economic Cooperation Between The Association of South East Asian Nations and The People's Republic of China* yang meresmikan komitmen ASEAN dan China untuk memperkuat kerja sama ekonomi sekaligus sebagai landasan bagi kerja sama perdagangan dalam sebuah kawasan perdagangan bebas yang ditargetkan bisa dicapai pada tahun 2010 oleh ASEAN-6, yaitu Brunei Darussalam, Filipina, Indonesia, Malaysia, Thailand, dan Singapura; dan tahun 2015 oleh CLMV, yaitu Cambodia,

⁴ Yasmin Sungkar, “ASEAN-China FTA: Komitmen Dan Implikasi Ekonomi” dalam Ratna Shofi Inayati (Ed.), *ASEAN-China FTA: Akselerasi Menuju East Asia Community (EAC)?*, (Jakarta: LIPI Press, 2006), hlm. 45–46.

Laos, Myanmar, dan Vietnam.⁵ ASEAN sebagai sebuah organisasi belum pernah sebelumnya membuat semacam pakta dengan sebuah negara di luar ASEAN. Sementara bagi China, ACFTA *Framework Agreement* ini adalah perjanjian perdagangan bebas pertamanya dengan negara lain.

Tujuan dari Persetujuan ACFTA ini (Artikel 1) adalah untuk:⁶

- 1) Memperkuat dan meningkatkan kerja sama ekonomi, perdagangan, dan investasi di antara para pihak (*parties*);
- 2) Meliberalisasikan secara progresif dan meningkatkan perdagangan barang dan jasa serta menciptakan suatu rezim investasi yang transparan, liberal, dan mudah;
- 3) Menggali bidang-bidang baru dan langkah-langkah pengembangan yang tepat untuk kerja sama ekonomi yang lebih erat di antara para pihak; dan
- 4) Memfasilitasi integrasi ekonomi yang lebih efektif dari negara-negara anggota ASEAN yang baru dan menjembatani perbedaan pembangunan di antara para pihak.

Para pihak sepakat untuk menegosiasikan secepatnya pendirian ASEAN-China FTA dalam 10 tahun, dan memperkuat serta meningkatkan kerja sama ekonomi melalui hal-hal sebagai berikut (Artikel 2)⁷:

- 1) Penghapusan secara progresif hambatan-hambatan tarif dan nontarif dalam semua perdagangan barang.
- 2) Liberalisasi perdagangan barang dan jasa secara progresif dengan cakupan sektor yang signifikan.
- 3) Pendirian rezim investasi yang terbuka dan berdaya saing yang memfasilitasi dan mendorong investasi dalam perdagangan bebas ASEAN-China.
- 4) Ketentuan perlakuan khusus dan berbeda serta fleksibilitas untuk negara-negara anggota ASEAN yang baru.
- 5) Ketentuan fleksibilitas bagi para pihak dalam negosiasi ASEAN-China FTA untuk

menanggulangi bidang-bidang yang sensitif dalam sektor barang, jasa, dan investasi di mana fleksibilitas akan dinegosiasikan dan disepakati bersama berdasarkan prinsip timbal-balik dan saling menguntungkan.

- 6) Pembentukan langkah-langkah fasilitasi perdagangan dan investasi yang efektif, tidak terbatas pada penyederhanaan prosedur kepabeanan dan pengembangan pengaturan pengakuan yang saling menguntungkan.
- 7) Perluasan kerja sama ekonomi dalam bidang-bidang yang mungkin disepakati bersama di antara para pihak yang akan melengkapi pendalaman hubungan perdagangan dan investasi antara para pihak dan perumusan rencana-rencana aksi dan program-program dalam rangka mengimplementasikan kerja sama dari sektor/bidang yang telah disepakati.
- 8) Pembentukan mekanisme yang tepat bagi efektivitas implementasi persetujuan ini.

Proses penurunan tarif menurut kesepakatan ACFTA ini dibagi dalam tiga tahap, yaitu *Early Harvest Programme* (EHP), jalur normal, dan jalur sensitif (Tabel 1).

Hingga saat ini, kemajuan proses menuju ACFTA dapat dilihat pada Tabel 2.

EHP mulai berlaku 1 Januari 2004. Produk-produk yang tidak masuk dalam skema EHP harus dimasukkan ke skema jalur normal. Tujuan dari EHP ini adalah untuk memfasilitasi pengurangan tarif sebelum ACFTA diimplementasikan secara penuh. Salah satu aspek yang menarik dari EHP ini adalah bahwa hampir seluruhnya bersifat *one-sided*, yaitu China membuat konsesi langsung. EHP mengizinkan produk ASEAN diekspor ke China dengan tarif yang sangat longgar sehingga negara-negara ASEAN mendapatkan keuntungan dari FTA bahkan sebelum FTA tersebut diwujudkan. Sebaliknya, China mendapatkan pengurangan tarif untuk produk pertanian tertentu. Satu hal yang dikritisi dari EHP ini adalah bahwa ia dinegosiasikan secara bilateral antara China dengan masing-masing negara ASEAN. Hal ini dikarenakan ASEAN tidak dapat mencapai konsensus di antara mereka sendiri. Filipina merupakan negara terakhir yang memasuki EHP, Mei 2005. Selain itu, dengan memberikan akses kepada anggota ASEAN ke pasar tertentu yang tidak terbuka bagi anggota

⁵ *Ibid.*

⁶ <http://www.aseansec.org/13196.htm>, diunduh pada 16 Agustus 2010.

⁷ *Ibid.*

Tabel 1. Tahapan Penghapusan Tarif Bea Masuk*

Tahap I	Tahap II	Tahap III
<p>Early Harvest Program (EHP) Chapter 1 sampai dengan Chapter 8, yaitu: Binatang hidup, Ikan, Dairy product, Tumbuhan, Sayuran, dan Buah-buahan. Kesepakatan Bilateral (produk spesifik) antara lain Kopi, Minyak Kelapa/CPO, Coklat, Barang dari karet, dan Perabotan. Tarif akan menjadi 0% pada tahun 2006</p>	<p>Normal Track I dan II</p> <p>Normal Track I Tarif akan menjadi 0% pada tahun 2010 Normal Track II Tarif akan menjadi 0% pada tahun 2012</p>	<p>Sensitive/Highly Sensitive List Sensitive List : (a) Tahun 2012 = maks. 20% ; (b) Pengurangan menjadi 0-5% pada tahun 2018. Dengan 304 Produk (HS 6 digit) antara lain Barang Jadi Kulit: Tas, Dompot; Alas kaki: Sepatu, Casual, Kulit; Kacamata; Alat Musik: Tiup, Petik, Gesek; Mainan: Boneka; Alat Olah Raga; Alat Tulis; Besi dan Baja; Spare part; Alat angkut; Glokasida dan Alkaloid Nabati; Senyawa Organik; Antibiotik; Kaca; Barang-barang Plastik. Highly Sensitive List : Tahun 2015 tarifnya maksimum 50%. Dengan 47 Produk (HS 6 digit), antara lain terdiri atas Produk Pertanian, seperti Beras, Gula, Jagung, dan Kedelai; Produk Industri Tekstil dan Produk Tekstil (ITPT); Produk Otomotif; Produk Ceramic Tableware</p>

* Disampaikan oleh Gusmardi Bustami, *op.cit.*

WTO maka hal ini memberikan keuntungan bagi anggota ASEAN sebagai *first mover* atas anggota WTO.⁸

Implikasi bagi Indonesia

Framework Agreement on The Comprehensive Economic Cooperation Between The Association of South East Asian Nations and The People's Republic of China telah ditandatangani pada 4 November 2002 di Phnom Penh. Pemerintah Republik Indonesia telah meratifikasi Persetujuan Kerangka Kerja mengenai Kerja sama Ekonomi Menyeluruh antara ASEAN-RRC tersebut dengan Keputusan Presiden Nomor 48 Tahun 2004 tentang Pengesahan *Framework Agreement on The Comprehensive Economic Cooperation between The Association of South East Asian Nations and The People's Republic of China*.

Selanjutnya, pelaksanaan EHP di Indonesia diatur dalam dua dokumen resmi, yaitu Keputusan Menteri Keuangan No. 355/KMK.01/2004 pada 21 Juli 2004 mengenai Ketentuan Tarif

Impor atas EHP-ACFTA; dan Keputusan Menteri Keuangan No. 356/KMK.01/2004 pada 21 Juli 2004 mengenai Ketentuan tarif di bawah EHP-ACFTA. Secara umum, sebanyak 530 produk dicatatkan masuk ke dalam EHP ASEAN-China dan 47 produk didaftarkan masuk ke dalam EHP Indonesia-China.⁹ Selain itu, juga telah ditetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 235/PMK.011/2008 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk dalam rangka ASEAN-China Free Trade Area yang menetapkan tarif bea masuk atas impor barang dari RRC dan negara-negara ASEAN dalam rangka ACFTA untuk tahun 2009–2012 yang mulai berlaku 1 Januari 2009.

Bagi Indonesia, sebagai salah satu negara anggota ASEAN yang menjadi pihak dari perjanjian tersebut, tentu harus menaati perjanjian ACFTA ini. Menurut prinsip-prinsip yang tercantum dalam kerangka perjanjian, kedua pihak harus secara bertahap menurunkan tarif produk yang kompetitif secara global lebih cepat daripada produk yang sensitif. Konsekuensinya, Indonesia harus menghapus secara progresif semua hambatan tarif dan nontarif dalam semua perdagangan barang. Jika pada 2004, tarif bea

⁸ Alyssa Greenwald, "The ASEAN-China Free Trade Area (ACFTA): A Legal Response To China's Economic Rise?", <http://www.law.duke.edu/shell/cite.pl?16+Duke+J.+Comp.+&+Int%27+L.+193>, diakses pada 25 Agustus 2010.

⁹ "Menggugat Perjanjian Kerja sama ASEAN-China", Global Justice Update Tahun ke-7/ Edisi ke-4 Desember 2009.

Tabel 2. Kemajuan Proses ACFTA*

No.	Kemajuan	Tanggal
1.	Penandatanganan <i>Framework Agreement on Comprehensive Economic Cooperation Between ASEAN and the People's Republic of China</i> (PRC).	Phnom Penh, 5 November 2002
2.	China-Thailand menandatangani <i>China-Thailand Early Harvest Programme Agreement</i>	Juni 2003
3.	Penandatanganan <i>Protocol to Amend the Framework Agreement on Comprehensive Economic Cooperation Between ASEAN and the PRC</i> , sebagai jalan implementasi penuh EHP, langkah pertama menuju ACFTA	Bali, 6 Oktober 2003
4.	Peluncuran <i>Early Harvest Programme</i> secara lengkap dan mencakup tarif khusus atas lebih dari 500 produk pertanian	1 Januari 2004
5.	Singapura masuk dalam China-Thailand EHP. Ketiganya sepakat menghapus tarif buah dan sayur mulai 1 Januari 2005.	Juni 2004
6.	Penandatanganan <i>Agreement on Dispute Settlement Mechanism of the Framework Agreement on Comprehensive Economic Cooperation Between ASEAN and the PRC</i> .	Vientiane, 29 November 2004
7.	Penandatanganan <i>Agreement on Trade in Goods of the Framework Agreement on Comprehensive Economic Cooperation Between ASEAN and the PRC</i> .	Vientiane, 29 November 2004
8.	China dan ASEAN memulai penurunan tarif bagi 7.000 komoditi perdagangan.	Juli 2005
9.	Penandatanganan <i>Agreement on Trade in Services of the Framework Agreement on Comprehensive Economic Cooperation Between ASEAN and the PRC</i> .	Cebu, Filipina, 14 Januari 2007
10.	Penandatanganan <i>Agreement on Investment of the Framework Agreement on Comprehensive Economic Cooperation Between ASEAN and the PRC</i> .	Bangkok, 15 Agustus 2009

Disarikan dari Yasmin Sungkar, op.cit, hlm. 55–56.

masuk ke Indonesia dalam skema ACFTA masih sebesar 9,9% maka pada 2010 ini sudah turun drastis menjadi 2,9%. Tak pelak, produk-produk China kini semakin membanjiri pasar Indonesia.

Inilah sebenarnya yang diserukan, terutama oleh kalangan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) di Indonesia yang merasakan dampak langsung dari perjanjian ini. Beberapa industri yang terkena dampak langsung dari FTA dengan China ini adalah industri baja, tekstil dan produk tekstil, makanan dan minuman, peralatan pertanian, alas kaki, elektronik mesin, dan industri mesin.¹⁰ China sangat unggul dalam

memproduksi tekstil dan garmen. Sementara itu, industri tekstil Indonesia pun belum sepenuhnya pulih dari krisis ekonomi yang mendera tahun 1997 dan sekarang harus menghadapi gempuran produk tekstil China. Tidak mengherankan jika pasar-pasar tekstil besar di Indonesia, terutama di Jakarta, seperti Pasar Tanah Abang dan Mangga Dua, dipenuhi oleh tekstil dan produk tekstil buatan China, bahkan ada yang dikenal dengan “batik China” yang harganya juga lebih murah. Di tengah meningkatnya penjualan kain batik di Indonesia akhir-akhir ini, ternyata tidak semuanya merupakan produk dari sentra-sentra batik di Indonesia karena China pun ikut bermain.

Industri makanan dan minuman pun demikian. Data Gabungan Pengusaha Makanan

¹⁰ *Ibid.*

dan Minuman Seluruh Indonesia (GAPMMI) menunjukkan impor makanan dan minuman selama tahun 2010 ini terus meningkat. Januari 2010 mencapai 13 juta US dolar, Februari 14,48 juta US dolar, Maret 14,86 juta US dolar, April 16,84 juta US dolar, Mei 17,34 juta US dolar, dan Juni mencapai 22,29 juta US dolar.¹¹

Dari sudut pandang ekonomi, sebenarnya China dan ASEAN lebih sebagai pesaing (kompetitor) satu sama lain daripada bersifat komplementer (saling melengkapi). Padahal, salah satu tujuan utama membentuk kawasan perdagangan bebas adalah untuk memanfaatkan komplementaritas yang ada. Sifat kompetitif dalam hubungan ASEAN-China ditunjukkan dengan kenyataan bahwa ASEAN dan China bukan saling menjadi pasar ekspor utama. Indonesia pun demikian. China menjadi tujuan ekspor keempat Indonesia setelah UE, Jepang, dan AS. Kedua pihak, baik China maupun Indonesia, masih berorientasi secara ekonomi terhadap negara-negara industri barat, seperti UE dan AS, termasuk juga Jepang sehingga Indonesia dan China masih dan akan saling berkompetisi untuk ekspor ke negara maju.

Masalahnya tidak hanya itu saja, fokus FTA dengan China pada sektor pertanian juga merupakan sebuah masalah besar. Sudah lebih dari satu dekade sektor pertanian Indonesia berada pada kondisi yang tidak menguntungkan. Lahirnya World Trade Organization (WTO) sejak 1 Januari 1995, secara otomatis membawa sektor pertanian masuk ke dalam kerangka perdagangan multilateral lewat *Agreement on Agriculture* (AoA). Indonesia sebagai salah satu anggota WTO tentu memiliki kewajiban untuk meliberalisasi pasarnya secara bertahap. Krisis ekonomi 1997 yang menghantam perekonomian Indonesia semakin mempercepat proses liberalisasi tersebut di mana Indonesia yang menjadi “pasien” International Monetary Fund (IMF) dipaksa untuk mengadopsi *Structural Adjustment Procedure* (SAP) sebagai “resep” yang harus diikuti, salah satunya adalah dengan liberalisasi perdagangan komoditas pertanian, khususnya pangan. Liberalisasi pangan kemudian dimulai tahun 1998 dengan mencabut subsidi pupuk, melepas tata niaga pupuk, dan menghapus

pembiayaan Kredit Likuiditas Bank Indonesia (KLBI), termasuk membuka kran impor beras seluas-luasnya, yang tidak lagi dimonopoli Badan Urusan Logistik (Bulog) dan penerapan tarif impor 0%. Inilah benih ketergantungan Indonesia terhadap impor pangan dari luar negeri hingga saat ini.¹² Masuknya sektor pertanian sebagai salah satu fokus dalam FTA dengan China ini tentu akan semakin membuat membanjirnya bahan pangan impor dan terpuruknya sektor pertanian Indonesia.

Namun demikian, penurunan tarif sebagaimana tercakup dalam ACFTA juga dinikmati Indonesia. Hampir seluruh produk perikanan asal Indonesia yang memasuki pasar China pada tahun 2010 diturunkan tarif bea masuknya menjadi 0% dari tarif normal sekitar 17,5%. Nilai ekspor perdagangan produk perikanan Indonesia ke China pada tahun 2009 diperkirakan sebesar 100,4 juta US dolar dan nilai impor sebesar 28,8 juta US dolar.¹³ Deputi Menteri Koordinator Perekonomian Bidang Industri dan Perdagangan, Edy Putra Irawady, juga menyebutkan bahwa ekspor produk makanan Indonesia ke China meningkat tajam sejak ACFTA. Ekspor produk manggis selama Januari–Mei 2010 naik 146% dibanding periode yang sama pada tahun lalu dan menempati posisi pertama dalam impor China pada produk manggis. Ekspor bubuk kakao (*cocoa powder*) menempati urutan ke-3 pada impor China dengan peningkatan sebesar 289% dibandingkan periode yang sama pada tahun lalu. Ekspor produk kacang-kacangan kering dan makanan kering naik sebesar 5,35% dan produk perikanan beku (*frozen fish*) naik 47,73% dibandingkan periode yang sama pada tahun lalu. Namun di sisi lain, masih banyak produk lokal kita yang belum masuk ke China sehingga terlebih dahulu diisi dari negara ASEAN lainnya, seperti Malaysia dan Thailand. Dari 50 produk impor utama China, Indonesia masih mengambil porsi sedikit.¹⁴

¹² Sugeng Bahagijo, *Globalisasi Menghempas Indonesia* (Jakarta: LP3ES, 2006), hlm. 227–228.

¹³ “Bea Masuk Produk Perikanan Indonesia ke China Nol Persen”, <http://www.antaranews.com/berita/1265206618/bea-masuk-produk-perikanan-indonesia-ke-china-nol-persen>, diunduh pada 11 Oktober 2010.

¹⁴ “Banyak Celah Produk Indonesia ke Pasar China”, <http://www.mediaindonesia.com/read/2010/07/01/152870/4/2/Banyak>

¹¹ “Produk Impor Mencemaskan”, *Kompas*, 24 Agustus 2010.

Meskipun pelaksanaan ACFTA sebenarnya sudah lebih dahulu berjalan dalam bentuk EHP, pelaksanaan *normal track* sejak 1 Januari 2010 ini menuai reaksi yang cukup keras di Indonesia, terutama munculnya suara-suara yang menyatakan tidak siap. Ketidaksiapan ini alasannya beragam, mulai dari kurangnya sosialisasi dari pemerintah mengenai implementasi ACFTA, ketakutan akan tergerus oleh produk-produk China dan akan menyebabkan hancurnya sektor UKM serta hilangnya pekerjaan, maupun performa sektor-sektor industri di Indonesia sendiri yang memang kurang kompetitif. Padahal kalau dirunut, ACFTA telah ditandatangani pada tahun 2001 untuk diimplementasikan tahun 2010 pada ASEAN-6. Artinya, pemerintah sebenarnya punya waktu yang cukup lama untuk menyosialisasikan ACFTA ini dan mempersiapkan sektor-sektor UKM agar bisa bersaing sambil membenahi infrastruktur yang akan menopang efektifnya sektor perekonomian Indonesia. Ketidaksiapan ini bahkan memunculkan opini untuk menunda implementasi ACFTA ini di Indonesia, meskipun menurut pemerintah hal itu tidak akan dimungkinkan.

Menurut Sjamsul Arifin, Direktur Internasional Bank Indonesia, keterlambatan dan kegagalan berbenah bisa melahirkan dua konsekuensi pahit. *Pertama*, Indonesia tetap memenuhi komitmen namun berisiko kalah bersaing. *Kedua*, Indonesia ingkar janji dan minta penundaan dengan alasan belum siap dan konsekuensinya akan mengakibatkan merosotnya kredibilitas Indonesia di mata internasional.¹⁵ Tampaknya Indonesia memainkan skenario pertama, yaitu tetap memenuhi komitmen dan berisiko kalah bersaing. Bukan pesimis, namun risiko ini bisa terjadi karena beberapa faktor.

Pertama, Indonesia versus China sebenarnya bukanlah lawan yang seimbang. China adalah aktor global yang sangat diperhitungkan dewasa ini. China merupakan negara dengan produk domestik bruto (GDP) terbesar ketiga setelah AS dan Jepang serta tidak menutup kemungkinan untuk menggeser posisi Jepang menjadi nomor dua setelah AS. China juga berhasil menunjukkan

daya tahan ekonomi negaranya ketika seluruh negara terguncang akibat krisis keuangan global tahun 2008, ia mampu menjaga tingkat pertumbuhan ekonominya dan sukses menjalankan program stimulus ekonomi. Robert Zoelick, Direktur Bank Dunia, bahkan mengungkapkan bahwa krisis global tersebut hanya dapat diselesaikan oleh G-2, yaitu AS dan China. China pada tahun 2009 telah mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi sebesar 8,4%, sementara Indonesia pada tahun yang sama hanya sekitar 4,4%. GDP per capita China tahun 2009 telah mencapai US \$ 6.500, sementara Indonesia hanya US \$ 4.000. Angka kemiskinan di Indonesia pada tahun 2006 mencapai 17,8%, sementara China pada tahun yang sama hanya sekitar 2,8%. Yang penting dari poin ini adalah bahwa China terlebih dahulu membangun basis ekonomi nasionalnya sebelum ia membuka pintu seluas-luasnya bagi dunia luar, termasuk ketika ia memutuskan masuk ke WTO tahun 2001. Sementara itu, Indonesia dengan basis ekonomi yang masih rapuh justru sudah jauh hari membuka pintu seluas-luasnya bagi negara asing.

Kedua, kondisi domestik Indonesia sendiri yang sebenarnya belum cukup kompetitif untuk bersaing. Ini sebenarnya yang menjadi akar permasalahan. Belum pulihnya beberapa sektor industri akibat krisis ekonomi 1997 ditambah krisis global tahun 2008 membuat ketika produk China masuk, beberapa sektor ini menjadi kelimpungan, seperti yang dihadapi industri tekstil. Belum memadainya infrastruktur yang menopang efektivitas dan efisiensi produksi dan faktor pendukung daya saing lainnya, seperti jalan, pelabuhan, listrik, dan suku bunga perbankan menyebabkan industri domestik tidak kompetitif. Sistem birokrasi yang ada terkadang justru mempersulit industri lokal untuk maju, misalnya ada produk impor yang semestinya bisa dibuat di dalam negeri, tetapi dipersulit perizinannya. Perizinan membutuhkan waktu lama, sementara produk impor dibiarkan menyerbu pasar domestik.¹⁶ Menurut Studi *Asia Foundation*, biaya distribusi di Indonesia paling mahal di dunia, yaitu 34 sen dolar per kilometer atau di dalam studi itu Rp3.093,00/kilometer. Jika jarak Jakarta–Surabaya 1.000 km maka ongkos truknya

Celah-Produk-Indonesia-ke-Pasar-China, diunduh pada 11 Oktober 2010.

¹⁵ Yasmin Sungkar, Op.Cit, hlm. 66.

¹⁶ “Produk Impor Mencemaskan”, Kompas, 24 Agustus 2010.

Rp3.093.000,00. Di China dan Thailand hanya 22 sen dolar per kilometer, sementara di Eropa hanya setengah dari Indonesia.¹⁷ Ekonomi biaya tinggi di Indonesia jika tidak dibenahi, kekhawatiran sejumlah pelaku usaha, terutama sektor UKM, bisa menjadi kenyataan produk lokal akan kalah bersaing dan terancam di negerinya sendiri serta menuju kebangkrutan dan menghasilkan pengangguran baru yang lebih masif.

Ketiga, pemerintah Indonesia nampaknya kurang memikirkan efek jangka pendek. Pemerintah hanya memikirkan efek jangka panjang yang memang kedua pihak akan saling diuntungkan. Studi *Danareksa Research Institute* mengenai ACFTA dan bagaimana dampaknya bagi ekspor Indonesia jika dilihat dari skenario satu, yaitu Indonesia ikut di ASEAN Free Trade Area (AFTA) dan ACFTA; dan skenario dua, yaitu Indonesia hanya ikut dalam AFTA menunjukkan bahwa kalau Indonesia ikut keduanya, maka akan mendapat keuntungan di China sekitar 3,4 miliar US dolar. Kalau hanya ikut satu, kita malah akan rugi sekitar 400 juta US dolar. Potensi kenaikan ekspor Indonesia ke RRC masih jauh lebih tinggi dibandingkan dengan kenaikan ekspor RRC ke Indonesia. Apabila Indonesia tidak mengikuti FTA dengan RRC, pasar Indonesia justru terancam oleh ekspansi produk dari ASEAN yang mendapatkan keuntungan atas tersedianya bahan baku atau produk antara yang lebih murah dari RRC. Akses Indonesia ke pasar RRC terbatas dan kalah bersaing dengan negara ASEAN lainnya. Dilihat pada dampak terhadap kesejahteraan juga menunjukkan kalau Indonesia ikut keduanya maka kesejahteraannya jauh lebih tinggi daripada hanya mengikuti AFTA. Jadi, Indonesia diperkirakan akan mendapat kesejahteraan mencapai sekitar 734 juta USD.¹⁸ Namun, dengan kondisi domestik yang masih rapuh dan tidak ada antisipasi akan efek jangka pendek, hal ini menjadi masalah tersendiri.

Keempat, kurangnya komunikasi, konsultasi, dan koordinasi antarpemangku kepentingan. Disebut-sebut bahwa pemerintahan Megawati, yang notabene menandatangani perjanjian ini, melakukannya tanpa ada konsultasi dan persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat

(DPR).¹⁹ Faktanya, perjanjian tersebut tidak pernah diratifikasi oleh DPR dan hanya dibuat dalam Keputusan Presiden No. 4 Tahun 2008. Implementasi ACFTA ini juga tanpa konsultasi yang serius dan ekstensif dengan *pressure groups* domestik.²⁰ Diseminasi skema EHP oleh pemerintah Indonesia dan juga ASEAN sendiri sangat minim sehingga hal ini mempersulit komunitas bisnis untuk mengeksplorasi mekanisme EHP tersebut. Sosialisasi ini sangat terkait dengan bagaimana koordinasi antara pemerintah dengan sektor bisnis/swasta. Ada suatu asosiasi yang mengaku bahwa sudah tahu mengenai ACFTA ini, sementara ada beberapa asosiasi yang mengaku belum mendengar sehingga belum melakukan persiapan terkait peraturan-peraturan yang keluar sehubungan dengan FTA tersebut. Isu “pemain baru”, baik di sektor swasta atau kalangan UKM maupun pejabat di kementerian terkait, disinyalir sebagai penyebab masalah di sosialisasi ACFTA ini.²¹ Sementara, koordinasi tidak hanya antara pemerintah dan sektor swasta, tetapi juga antarinstansi pemerintah, antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, dan koordinasi antara regulasi dan penegakannya (enforcement). Perkembangan otonomi daerah di Indonesia yang memberi peran kepada daerah dalam pengambilan keputusan dalam beberapa kasus ternyata kontraproduktif dengan upaya mengkoordinasikan regulasi. Seringkali yang terjadi, pemerintah kabupaten menetapkan regulasi yang bertujuan untuk melindungi pengusaha lokalnya dengan jalan menetapkan bea tambahan bagi produk pengusaha di luar wilayahnya. Contohnya, di Pacitan ada Peraturan Daerah yang mengatur bahwa UKM dari Madiun dan Magetan tidak boleh menjual makanan ke Pacitan untuk melindungi daerah, walaupun masuk dari Magetan ke Pacitan diharuskan untuk membayar.²²

Kelima, kurang tersedianya data yang akurat dari pihak China sehingga pemetaan kebutuhan

¹⁹ Alexander C. Chandra, “Indonesia di Tengah Kesepakatan FTA ASEAN-China: Satu Kajian Kritis” dalam I. Wibowo dan Syamsul Hadi (Ed.), *Op. Cit.*, hlm. 233.

²⁰ Alexander C. Chandra, “ASEAN-China Free Trade Agreement In or Out? Indonesia’s Dilemma”, *AsiaViews* January-February 2010, hlm. 19.

²¹ Disampaikan oleh Thomas Darmawan, *Op. Cit.*

²² *Ibid.*

¹⁷ Disampaikan Thomas Darmawan, *Op. Cit.*

¹⁸ Disampaikan oleh Gusmardi Bustami, *Op. Cit.*

pasar antara China dan Indonesia menjadi sangat minim. Angka perdagangan China seringkali tak dapat dijadikan acuan. Seringkali ekspor China ke Asia Tenggara jauh lebih besar dari apa yang dilaporkan di atas laporan neraca perdagangan.²³ Data pasar China yang ada masih terbilang tidak cukup tersebar sehingga pelaku usaha nasional masih harus meraba-raba kebutuhan dan karakteristik pasar China. Hal ini tentu mempersulit pembuat kebijakan di Indonesia untuk membuat kebijakan yang tepat.

Penutup

Perjanjian perdagangan bebas dengan China dalam skema ACFTA memang bukanlah perjanjian perdagangan bebas yang pertama bagi Indonesia. Namun, perjanjian perdagangan bebas dengan China ini dirasa membawa dampak yang lebih nyata seiring membanjirnya produk-produk China di pasar Indonesia. Sifat kompetitif dibanding komplementer di antara keduanya menjadikan industri dalam negeri, terutama sektor UKM di Indonesia menghadapi tantangan yang sulit dan nyaris terpuruk. Belum lagi ditambah kondisi beberapa sektor industri, terutama tekstil yang belum pulih benar akibat krisis ekonomi 1997. Kondisi ini belum lagi ditambah dengan ketidaksiapan infrastruktur Indonesia yang akan menopang efektivitas dan efisiensi produksi, seperti jalan, pelabuhan dan listrik; sistem birokrasi Indonesia yang masih berbelit-belit dan belum dibenahi, hingga suku bunga perbankan yang masih tinggi dan belum mengalir ke sektor manufaktur, dengan kredit masih mengalir ke sektor konsumsi yang berbasis investasi jangka pendek. Semua masalah nampaknya bermuara pada kondisi domestik Indonesia sendiri yang masih rapuh.

Pemerintah memang telah melakukan langkah-langkah terkait persoalan ini. Secara organisasional, pemerintah menyiapkan tim peningkatan daya saing, yaitu Tim Koordinasi Penanganan Hambatan Industri dan Perdagangan (SK. Menko Perekonomian No. Kep-42/M.EKON/12/2009) dengan pengarah Menteri Koordinator Perekonomian dan para menteri

terkait dan tim pelaksananya adalah para pejabat Eselon I dari kementerian terkait dan pelaku usaha (Kamar Dagang dan Industri/KADIN dan Asosiasi Pengusaha Indonesia/APINDO) serta 3 tim teknis yang fokus kepada tiga strategi menghadapi ACFTA ini, yaitu Penguatan Daya Saing Global, Pengamanan Pasar Domestik, dan Penguatan Ekspor. ACFTA sendiri sebenarnya bisa menjadi pendorong bagi UKM untuk lebih berdaya saing jika kehadiran barang impor didukung oleh kebijakan domestik yang tepat.

Tentu sangat sulit bagi Indonesia untuk mundur dari kesepakatan ACFTA. Penandatanganan perjanjian tersebut idealnya sejalan dengan strategi pemerintah dalam meningkatkan perekonomian bangsa. Namun, Indonesia tampaknya masih menghadapi persoalan mengenai ketidakjelasan target pemerintah terkait perdagangan bebas yang dilakukan.

Saat ini bukan waktunya lagi untuk membicarakan siap atau tidak kita akan implementasi ACFTA ini karena mau tidak mau, ia sudah di depan mata. Yang harus dilakukan adalah memperbaiki kondisi domestik seraya terus memperkuat kapasitas domestik kita. Permasalahan sebenarnya ada pada diri kita sendiri yang belum kompetitif. Ibarat berperang kita harus tahu lawan kita siapa, bagaimana karakternya, dan apa yang menjadi target kita sehingga kita mempunyai arah yang jelas dan mampu memaksimalkan hasil. Indonesia harus mempunyai strategi untuk menembus pasar China; perbaikan dan penguatan infrastruktur yang menopang industri serta penguatan reformasi birokrasi dan penciptaan regulasi yang benar-benar pro terhadap industri domestik sebagai bagian dari strategi Indonesia. Indonesia harus punya strategi, *workplan* yang ketat dan hasil yang terukur sehingga kita tidak tertelan oleh derasnya arus produk China.

Daftar Pustaka

Bahagijo, Sugeng. 2006. *Globalisasi Menghempas Indonesia*. Jakarta: LP3ES.

"Bea Masuk Produk Perikanan Indonesia ke China Nol Persen", <http://www.antaraneews.com/berita/1265206618/bea-masuk-produk-perikanan-indonesia-ke-china-nol-persen>, diakses pada 11 Oktober 2010.

²³ Alexander C. Chandra, "Indonesia di Tengah Kesepakatan FTA ASEAN-China: Satu Kajian Kritis" dalam I. Wibowo dan Syamsul Hadi (Ed.), *Op. Cit*, hlm. 245.

- “Banyak Celah Produk Indonesia ke Pasar China”, <http://www.mediaindonesia.com/read/2010/07/01/152870/4/2/Banyak-Celah-Produk-Indonesia-ke-Pasar-China>, diakses pada 11 Oktober 2010.
- Chandra, Alexander C. 2010. “ASEAN-China Free Trade Agreement In or Out? Indonesia’s Dilemma”, *AsiaViews* January-February.
- Greenwald, Alyssa, “The ASEAN-China Free Trade Area (ACFTA): A Legal Response To China’s Economic Rise?”, dalam <http://www.law.duke.edu/shell/cite.pl?16+Duke+J.+Comp.+&+Int%27+L.+193>, diakses pada 25 Agustus 2010.
- <http://www.aseansec.org/13196.htm>, diakses pada 16 Agustus 2010.
- Inayati, Ratna Shofi (ed.). 2006. *ASEAN-China FTA: Akselerasi Menuju East Asia Community (EAC)?*. Jakarta: LIPI Press.
- “Menggugat Perjanjian Kerja sama ASEAN-China”, *Global Justice Update* Tahun ke-7/ Edisi ke-4 Desember 2009.
- “Penandatanganan Plan of Action Deklarasi Bersama Kemitraan Strategis RI-RRC”, <http://www.dep-lu.go.id/beijing/Pages/Print.aspx?ListName=EmbassiesNews&IDP=12&CID=id-ID>, diakses pada 16 Agustus 2010.
- Pointers Gusmardi Bustami dalam *Round Table Discussion* “Indonesia di Tengah Pusaran Arus Perdagangan Bebas” diselenggarakan oleh Pusat Penelitian Politik LIPI, Jakarta, 27 April 2010.
- Pointers Thomas Darmawan *Round Table Discussion* “Indonesia di Tengah Pusaran Arus Perdagangan Bebas” diselenggarakan oleh Pusat Penelitian Politik LIPI, Jakarta, 27 April 2010.
- “Produk Impor Mencemaskan”, *Kompas*, 24 Agustus 2010.
- Transkrip *Round Table Discussion* “Indonesia di Tengah Pusaran Arus Perdagangan Bebas” diselenggarakan oleh Pusat Penelitian Politik LIPI, Jakarta, 27 April 2010.
- Wibowo, I dan Syamsul Hadi (Ed.). 2009. *Merangkul China Hubungan Indonesia-China Pasca-Soeharto*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.